

DAMPAK REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Reza Pahlevi

NPP. 32.0903

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: mreza7112@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. M. B. Zubakhrum Tjenreng, M. Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Coastal reclamation has become one of the government's strategic efforts to overcome land limitations in coastal areas of major cities such as Makassar. This activity aims to support the development of infrastructure, residential areas, public spaces, and other economic sectors. However, reclamation practices often result in negative impacts affecting coastal communities and the surrounding environmental balance.

Purpose: This study aims to analyze the social, economic, and environmental impacts of coastal reclamation in Makassar City, particularly at Losari Beach, and to evaluate the efforts of the Makassar City Government in managing these impacts. **Method:** The research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants consisted of structural officials, fire department personnel, and community members. The theory used in analyzing this study is Duncan's organizational effectiveness theory as cited by Steers (1985), which focuses on three dimensions: goal achievement, integration, and adaptation. **Result:** The results show that reclamation provides benefits such as the expansion of public spaces and investment potential. However, negative impacts also arise, such as decreased income for fishermen, environmental pollution, and damage to coastal ecosystems. The government has made several mitigation efforts, but public participation and environmental oversight still need improvement. **Conclusion:** Therefore, sustainable development-based reclamation is essential, involving active community participation and integrating environmental protection in every stage of planning and implementation.

Keywords: Coastal Reclamation, Social, Economic, Environment, Makassar City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Reklamasi pantai menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam menanggulangi keterbatasan lahan di wilayah pesisir kota-kota besar seperti Makassar. Kegiatan reklamasi bertujuan untuk menunjang pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman, ruang publik, dan sektor ekonomi lainnya. Namun, praktik reklamasi tidak jarang menimbulkan dampak negatif yang memengaruhi masyarakat pesisir serta keseimbangan lingkungan sekitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengevaluasi upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola dampak tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, tampil data dan penarikan kesimpulan. Informan terdiri dari pejabat Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan masyarakat terdampak. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi memberikan dampak dalam peningkatan ruang terbuka publik dan potensi investasi. Namun,

dampak negatif juga muncul, seperti penurunan pendapatan nelayan, pencemaran lingkungan, dan rusaknya ekosistem pesisir. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya mitigasi, namun partisipasi masyarakat dan pengawasan lingkungan masih perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, pentingnya reklamasi berbasis pembangunan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek reklamasi.

Kata kunci: Reklamasi Pantai, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Kota Makassar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reklamasi pantai merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan, khususnya di wilayah pesisir kota-kota besar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas daratan guna memenuhi kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, kawasan bisnis, dan sektor pariwisata. Selain sebagai solusi spasial, reklamasi juga dipandang sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Djamil, 2022).

Namun, praktik reklamasi tidak lepas dari berbagai persoalan lingkungan yang kompleks. Chee *et al.* (2017) menyoroti bahwa reklamasi pesisir di banyak wilayah Asia telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, termasuk rusaknya habitat pesisir dan meningkatnya tekanan ekologis. Proses reklamasi berisiko menimbulkan degradasi ekosistem pesisir, seperti rusaknya terumbu karang, padang lamun, serta hilangnya hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir. Dampak lain yang kerap muncul antara lain adalah pencemaran air laut, perubahan arus, sedimentasi, dan peningkatan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir rob (Rizqiah, 2023).

Dari sudut pandang sosial, kelompok masyarakat pesisir (terutama nelayan) sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh proyek reklamasi. Hilangnya akses terhadap laut, penurunan hasil tangkapan ikan, hingga perubahan pola mata pencaharian menyebabkan turunnya pendapatan rumah tangga nelayan secara drastis. Phan & Stive (2022) menunjukkan bahwa reklamasi di wilayah Delta Mekong juga berdampak langsung terhadap kehilangan fungsi lahan mangrove dan mata pencaharian nelayan lokal. Dalam kasus reklamasi Pantai Losari, tercatat bahwa hasil tangkapan menurun hingga 80%, yang menyebabkan banyak nelayan terpaksa mencari alternatif pekerjaan tanpa keahlian yang memadai.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilakukan secara terarah, adil, dan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup penyusunan regulasi, pengawasan implementasi proyek, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi reklamasi. Melalui pendekatan partisipatif dan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat terdampak (Husin, 2017).

Penataan ruang wilayah yang baik menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan efisien. Dengan perencanaan tata ruang yang terintegrasi, potensi wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Annas & Rusnaedy, 2019).

Kota Makassar menjadi salah satu contoh kota yang aktif mengembangkan wilayah pesisir melalui proyek reklamasi, seperti pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI). Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas ruang publik, menarik investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kota. Namun, proyek ini juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekologis yang patut diteliti secara ilmiah. Duan *et al.* (2016)

mencatat bahwa kegiatan reklamasi laut di Tiongkok menyebabkan tekanan signifikan pada sumber daya laut dan menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis secara komprehensif dampak reklamasi Pantai Losari dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengevaluasi upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola reklamasi secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul seiring dengan pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar, khususnya di kawasan Pantai Losari. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu: apa saja dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kota Makassar, serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengelola dampak reklamasi pantai terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan ini muncul karena pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir seringkali menimbulkan kontradiksi antara tujuan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Kegiatan reklamasi yang bertujuan untuk memperluas ruang publik dan meningkatkan investasi ternyata menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti penurunan pendapatan nelayan, pencemaran lingkungan, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Dalam konteks ini, perlu adanya kajian yang mampu menjelaskan secara menyeluruh dampak dari kegiatan reklamasi sekaligus mengevaluasi peran pemerintah dalam menangani dampak-dampak tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah meneliti isu reklamasi pantai, namun masing-masing memiliki keterbatasan pada fokus kajian yang sempit. Misalnya, penelitian oleh Adjam & Sinyo (2023) di Kota Ternate menyoroti dampak ekonomi dan persepsi masyarakat, tetapi tidak secara mendalam membahas aspek lingkungan dan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian oleh Nindita (2021) di Jakarta Utara mengkaji dampak sosial dan ekonomi terhadap kehidupan nelayan, tetapi tidak mengangkat peran pemerintah dalam proses mitigasi dampak. Penelitian oleh Japar (2020) memang dilakukan di Kota Makassar, tetapi lebih berfokus pada persepsi masyarakat dan dampak lingkungan, tanpa membahas keterlibatan aktif pemerintah secara konkret. Oleh karena itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menggabungkan ketiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dalam satu kerangka analisis yang utuh sekaligus meninjau strategi pemerintah daerah dalam mengelola proyek reklamasi secara berkelanjutan.

Kesenjangan penelitian ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengisi ruang kosong dalam kajian ilmiah yang ada, khususnya dalam memahami dampak reklamasi pantai secara multidimensional dan kontekstual. Dalam hal ini, Kota Makassar menjadi lokus yang relevan karena sedang mengembangkan proyek besar reklamasi Pantai Losari melalui program *Center Point of Indonesia* (CPI). Proyek tersebut tidak hanya berdampak terhadap tata ruang dan pembangunan fisik kota, tetapi juga terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan kondisi ekosistem laut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai konsekuensi dari reklamasi serta sejauh mana pemerintah daerah hadir dalam mengatasi berbagai dampak yang muncul.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan tidak hanya memotret fenomena reklamasi dari satu sisi saja, melainkan dengan menggabungkan tiga dimensi utama yang terdampak, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di samping itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada evaluasi terhadap peran Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Penataan Ruang, dalam menyusun regulasi, mengawasi pelaksanaan reklamasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting mengingat keberhasilan proyek reklamasi tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya hadir untuk menambah khazanah keilmuan mengenai reklamasi pantai di Indonesia, tetapi juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif terhadap isu reklamasi dan penyusunan rekomendasi yang berbasis pada kondisi nyata masyarakat terdampak. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan data, analisis, dan kebijakan yang lebih adaptif dalam konteks pembangunan wilayah pesisir di masa depan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai reklamasi pantai telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam sesuai dengan konteks wilayah dan pendekatan masing-masing. Namun, sebagian besar dari penelitian tersebut cenderung hanya membahas satu atau dua aspek dampak reklamasi secara sektoral, tanpa mengintegrasikan seluruh dimensi yang terdampak, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengulas peran pemerintah dalam mengelola dan memitigasi dampak dari proyek reklamasi tersebut. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk menghadirkan kajian yang lebih komprehensif, khususnya dalam konteks reklamasi pantai di Kota Makassar.

Salah satu penelitian dilakukan oleh Adjam & Sinyo (2023) yang mengkaji dampak reklamasi pantai terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menunjukkan bahwa 91% responden merasa reklamasi meningkatkan penghasilan, namun tetap menyimpan kekhawatiran terhadap dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan. Sementara itu, Nindita (2021) melakukan penelitian di Kalibaru, Jakarta Utara, dengan metode kombinasi (*mix method*). Ia menyoroti bagaimana reklamasi mengganggu kehidupan sosial ekonomi nelayan, menyebabkan mereka harus mencari mata pencaharian baru akibat berkurangnya hasil laut.

Dalam konteks Kota Makassar, beberapa penelitian juga telah dilakukan. Japar (2020) meneliti persepsi masyarakat terhadap program reklamasi Pantai Losari dan menemukan bahwa reklamasi menimbulkan keresahan sosial dan lingkungan, seperti rusaknya ekosistem, banjir rob, dan berkurangnya akses masyarakat pesisir terhadap laut. Penelitian oleh Achsanuddin dkk. (2023) mengkaji pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) dari perspektif ekonomi Islam. Mereka menemukan bahwa kegiatan reklamasi menurunkan ekonomi nelayan akibat menyusutnya hasil tangkapan laut. Penelitian lain oleh Juardi & A. Bimontoro (2023) juga membahas interaksi ekonomi nelayan akibat reklamasi CPI. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun pendapatan nelayan menurun, reklamasi membuka peluang investasi dan meningkatkan PAD, meskipun fokus penelitian ini hanya terbatas pada aspek ekonomi.

Melalui penelaahan terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang belum terjawab, yaitu kurangnya kajian yang secara menyeluruh membahas dampak reklamasi dari ketiga dimensi utama (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dalam satu kerangka terpadu. Selain itu, belum ada kajian yang secara mendalam menganalisis peran Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan reklamasi Pantai Losari. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan holistik yang tidak hanya menganalisis dampak-dampaknya, tetapi juga mengevaluasi upaya strategis pemerintah dalam menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji secara menyeluruh dampak reklamasi pantai di Kota Makassar dari tiga dimensi sekaligus, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti satu aspek, seperti studi Adjam & Sinyo (2023) yang fokus pada dampak ekonomi di Ternate, atau Nindita (2021) yang meneliti aspek sosial ekonomi nelayan di Jakarta Utara, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dampak reklamasi dalam konteks perkotaan pesisir yang kompleks seperti di Makassar.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari penelitian Japar (2020) yang hanya menekankan pada persepsi masyarakat terhadap reklamasi Pantai Losari. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat dari sisi persepsi atau pengalaman masyarakat, tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam bentuk-bentuk dampak yang terjadi serta memetakan peran pemerintah dalam pengelolaan reklamasi tersebut. Penelitian terdahulu belum menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek evaluatif utama, padahal pemerintah memegang peran penting dalam merancang dan mengendalikan proyek reklamasi.

Sebagai praja IPDN, peneliti juga membawa sudut pandang kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang khas dan berbeda dari penelitian mahasiswa umum. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan reklamasi dijalankan, sejauh mana partisipasi masyarakat difasilitasi, dan bagaimana dampak sosial-ekologis tersebut ditangani oleh lembaga pemerintah daerah. Dengan demikian, kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap isu reklamasi pantai, serta kontribusinya dalam memperkuat pemahaman akademik mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh dampak reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengevaluasi peran Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola dampak-dampak tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan sosial masyarakat pesisir, kondisi ekonomi lokal, dan kualitas lingkungan setelah reklamasi, sekaligus menelaah bagaimana kebijakan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat diakomodasi dalam proses reklamasi guna mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan inklusif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam dampak reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif tepat digunakan untuk menelaah fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan angka semata. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena kompleks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dan membutuhkan pemahaman terhadap makna, pengalaman, serta respons masyarakat dan pemerintah terhadap perubahan yang terjadi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menjelajahi kondisi di lapangan secara fleksibel dan alami, tanpa membatasi informasi hanya pada angka, tetapi juga menggali narasi dan konteks yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6–25 Januari 2025 di Kota Makassar, dengan lokasi utama berada di kawasan Pantai Losari dan sekitarnya yang merupakan pusat pelaksanaan reklamasi, serta di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sebagai institusi yang terlibat langsung dalam perencanaan proyek reklamasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap berbagai informan yang dianggap memiliki relevansi terhadap isu yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, dipilih karena mereka memiliki otoritas dan pemahaman langsung mengenai kebijakan reklamasi, proses perizinan, serta pengawasan pelaksanaannya. Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat pesisir terdampak, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil, yang dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* agar dapat menjangkau kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan, laporan pemerintah, publikasi akademik, artikel berita, serta data statistik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat kondisi fisik wilayah reklamasi serta aktivitas masyarakat di sekitar Pantai Losari. Wawancara semi terstruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan namun fleksibel dalam menggali informasi dari informan. Dokumentasi digunakan sebagai bahan pelengkap dan pembanding, berupa arsip kebijakan, foto lapangan, serta laporan proyek reklamasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus. Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Melalui kombinasi teknik tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu memberikan gambaran utuh mengenai dampak reklamasi serta peran pemerintah dalam mengelolanya secara berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini membahas jawaban atas rumusan masalah yang mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat reklamasi pantai di Kota Makassar serta upaya pemerintah dalam mengelola dampak tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Reklamasi Pantai yang mencakup tiga dimensi utama (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dengan fokus pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sebagai instansi kunci dalam perencanaan dan pengawasan reklamasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kepala Bidang Perencanaan Ruang. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam metode penelitian lapangan (*field research*), yang kemudian dianalisis berdasarkan indikator pada operasionalisasi konsep untuk menjawab persoalan penelitian secara sistematis.

3.1. Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi yang Ditimbulkan Akibat Reklamasi Pantai di Kota Makassar

Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kota Makassar dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Reklamasi Pantai yang dikemukakan oleh Dhai Rafsanjai (2021), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dimensi sosial dianalisis melalui indikator keterlibatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap proyek reklamasi. Dimensi ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi lokal dan perubahan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah reklamasi. Sementara itu, dimensi lingkungan dikaji melalui indikator kualitas lingkungan dan keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk evaluasi terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan.

a. Dampak Sosial Reklamasi Pantai di Kota Makassar

Dampak sosial merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu proyek reklamasi pantai. Dalam konteks Kota Makassar, reklamasi

Pantai Losari tidak hanya membawa perubahan fisik pada wilayah pesisir, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat sekitar, khususnya kelompok rentan seperti nelayan, pedagang kecil, dan warga pesisir lainnya. Untuk menilai dampak sosial secara komprehensif, digunakan tiga indikator utama berdasarkan teori Dhai Rafsanjai (2021), yaitu keterlibatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta persepsi dan kepuasan masyarakat.

Pada indikator keterlibatan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses reklamasi di Kota Makassar masih didominasi oleh pendekatan top-down. Meskipun pihak pemerintah menyatakan telah melakukan forum konsultasi publik, dalam praktiknya keterlibatan masyarakat hanya bersifat simbolik dan informatif. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yang mengakui bahwa masyarakat hanya diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah dan investor. Di sisi lain, masyarakat pesisir, khususnya nelayan, merasa tidak dilibatkan secara nyata dan tidak diberi informasi yang transparan sejak awal proyek dimulai. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan komunikasi yang berujung pada resistensi sosial dan penurunan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, proyek reklamasi Pantai Losari menghasilkan dampak yang beragam. Pemerintah menyatakan bahwa reklamasi membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nelayan sebagai kelompok terdampak langsung justru mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan wilayah tangkap dan kerusakan lingkungan laut. Meskipun terdapat upaya pemerintah melalui pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi lokal, belum seluruh masyarakat pesisir merasakan dampak positif secara signifikan. Sebagian warga mulai memperoleh manfaat secara bertahap, namun dampaknya masih belum merata, terutama bagi kelompok ekonomi bawah.

Persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap proyek reklamasi juga sangat beragam. Sebagian masyarakat memandang reklamasi sebagai bentuk kemajuan kota dan modernisasi, terutama karena hadirnya fasilitas umum dan ruang terbuka yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, tidak sedikit pula yang memandangnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Keluhan terkait penurunan hasil tangkapan, naiknya biaya hidup, dan belum adanya solusi konkret dari pemerintah membuat tingkat kepuasan terhadap proyek ini menurun, terutama di kalangan nelayan. Ketimpangan antara janji pembangunan dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepercayaan publik terhadap proyek ini.

Aksi-aksi protes seperti demonstrasi nelayan di kawasan reklamasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap dampak yang mereka rasakan. Ketika ruang partisipasi tidak dibuka secara luas dan aspirasi tidak ditindaklanjuti secara konkret, resistensi sosial menjadi keniscayaan. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berusaha menjadi subjek yang aktif dalam menentukan masa depan ruang hidup mereka. Bukti visual seperti spanduk “STOP REKLAMASI” menjadi simbol dari penolakan terhadap proses pembangunan yang tidak inklusif dan tidak berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar bersifat kompleks dan multidimensi. Meskipun proyek ini memiliki potensi untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, implementasinya masih menyisakan berbagai permasalahan sosial, terutama terkait keterlibatan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Persepsi yang beragam dari masyarakat menunjukkan bahwa proses reklamasi belum sepenuhnya responsif terhadap

kebutuhan dan kepentingan warga lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis keadilan sosial dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek reklamasi ke depannya.

b. Dampak Ekonomi Reklamasi Pantai di Kota Makassar

Reklamasi pantai tidak hanya berdampak pada perubahan fisik dan tata ruang wilayah pesisir, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, dimensi ekonomi dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Kedua indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana proyek reklamasi Pantai Losari mampu menciptakan peluang ekonomi baru, sekaligus mengidentifikasi apakah manfaat ekonomi tersebut dirasakan secara merata, khususnya oleh masyarakat pesisir yang terdampak langsung.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi lokal, proyek reklamasi di Kota Makassar memberikan peluang baru bagi ekspansi sektor properti, perdagangan, dan pariwisata. Kawasan hasil reklamasi menjadi magnet investasi dengan dibangunnya hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan ruang publik yang menarik wisatawan dan pelaku usaha. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya perputaran ekonomi lokal serta mendorong pengembangan sektor jasa, termasuk UMKM di sekitar wilayah reklamasi. Beberapa warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kini mendapatkan pekerjaan di sektor informal seperti jasa kebersihan, konstruksi, hingga penjaga fasilitas. Pemerintah daerah mengakui bahwa proyek ini berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan terbukanya lapangan kerja di sektor jasa dan perdagangan. Seto *et al.* (2016) menyebutkan bahwa ekspansi wilayah perkotaan melalui reklamasi sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa risiko telekoneksi lingkungan lintas wilayah. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Penataan Ruang dan masyarakat setempat, terlihat bahwa keberadaan kawasan baru hasil reklamasi mulai menghidupkan aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak berkembang di wilayah tersebut.

Namun demikian, tidak semua sektor masyarakat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada indikator pendapatan masyarakat, ditemukan bahwa nelayan tradisional yang sebelumnya menggantungkan hidup dari laut mengalami penurunan penghasilan akibat terganggunya wilayah tangkap dan perubahan kondisi perairan. Mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih tinggi, sementara hasil tangkapan semakin menurun. Keluhan mengenai menurunnya pendapatan harian dan belum adanya solusi konkret dari pemerintah untuk mengganti sumber penghidupan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan akses terhadap manfaat ekonomi reklamasi. Beberapa warga memang memperoleh manfaat dari pelatihan atau pekerjaan baru, namun dampaknya belum merata dan belum menjangkau semua kelompok terdampak.

Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dari sektor perikanan ke sektor jasa dan perdagangan. Warung makan, kios kecil, dan layanan transportasi lokal mulai tumbuh di sekitar kawasan reklamasi. Namun di wilayah pesisir yang lebih jauh dari pusat reklamasi, terlihat aktivitas nelayan yang melemah, bahkan beberapa perahu tidak lagi digunakan secara aktif. Sementara masyarakat yang memiliki aset atau modal lebih dapat beradaptasi dengan cepat, kelompok rentan dengan keterbatasan sumber daya tampak tertinggal. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi baru di tengah proses pembangunan yang seharusnya bersifat inklusif.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa reklamasi Pantai Losari memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan

investasi, terbukanya lapangan kerja, dan berkembangnya sektor jasa. Namun, dampak positif tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama nelayan tradisional dan pelaku usaha kecil yang kehilangan akses terhadap sumber daya laut. Hamid (2018) menekankan pentingnya keadilan distribusi manfaat pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antarkelompok sosial dalam kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, agar reklamasi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan kebijakan distribusi manfaat yang merata, program pendampingan ekonomi berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah reklamasi.

c. **Dampak Lingkungan Reklamasi Pantai di Kota Makassar**

Dampak lingkungan menjadi salah satu dimensi yang paling penting dalam menganalisis proyek reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar. Sebagai aktivitas pembangunan skala besar di kawasan pesisir, reklamasi tidak hanya mengubah struktur wilayah fisik, tetapi juga berpotensi besar mengganggu ekosistem laut dan keseimbangan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji dampak lingkungan melalui dua indikator utama, yaitu kualitas lingkungan dan keberlanjutan lingkungan, guna memahami bagaimana reklamasi memengaruhi kondisi ekologis serta sejauh mana upaya pemerintah dalam mengelola dampak tersebut secara bertanggung jawab.

Pada indikator kualitas lingkungan, ditemukan bahwa reklamasi Pantai Losari sempat menimbulkan peningkatan kekeruhan air laut, terutama pada tahap awal pengerukan dan penimbunan. Warga dan nelayan setempat mencatat perubahan pada kejernihan air serta munculnya sampah dan partikel halus yang mengganggu aktivitas laut. Pemerintah Kota Makassar, melalui keterangan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kepala Bidang Perencanaan Ruang, menyatakan bahwa seluruh proses telah melalui uji analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta dilakukan pengawasan ketat terhadap kualitas air dan udara. Beberapa perbaikan telah dilakukan, seperti pembangunan kanal untuk mengatur sirkulasi air laut dan penyediaan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas udara. Meski demikian, observasi lapangan masih menemukan adanya akumulasi sampah dan kondisi air yang keruh di beberapa titik, yang menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan berjalan bertahap.

Pada indikator keberlanjutan lingkungan, perhatian utama terletak pada upaya jangka panjang pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem dan menjamin bahwa reklamasi tidak mengancam keseimbangan ekologis. Pernyataan dari pejabat Dinas Penataan Ruang menunjukkan bahwa proyek ini telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, melakukan pemantauan berkala, serta melibatkan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan. Ruang terbuka hijau dirancang untuk menyaring polusi udara, sementara sistem pengelolaan sampah terpadu diintegrasikan dalam kawasan reklamasi. Namun, seperti yang tergambar dalam dokumentasi dan observasi di lapangan, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar diterapkan secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak.

Observasi langsung yang dilakukan peneliti di kawasan reklamasi menunjukkan adanya dinamika yang cukup kontras. Di satu sisi, terlihat upaya serius dari pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan, seperti kanal, taman kota, dan jalur hijau. Kualitas udara di beberapa titik bahkan terasa lebih baik dengan adanya vegetasi peneduh. Namun di sisi lain, kondisi air laut di dekat area pengerukan masih menunjukkan kekeruhan dan pencemaran ringan yang berpotensi memengaruhi biota laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Perubahan struktur pantai juga memengaruhi pola interaksi masyarakat dengan laut, termasuk terganggunya aktivitas nelayan tradisional. Sengupta *et al.* (2023) dalam pemetaan global reklamasi menunjukkan bahwa

transformasi garis pantai telah memicu gangguan besar terhadap komunitas lokal yang bergantung pada akses laut. Walau ada peningkatan ekonomi di sektor wisata dan jasa, tekanan terhadap ekosistem tetap menjadi tantangan serius yang harus terus dimitigasi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar memberikan dampak signifikan terhadap dimensi lingkungan, baik dari sisi kualitas maupun keberlanjutannya. Pemerintah menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan AMDAL, pembangunan ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan sampah, namun masih diperlukan peningkatan pengawasan dan perbaikan di beberapa aspek teknis dan sosial. Reklamasi yang dilakukan tanpa pengelolaan berkelanjutan berisiko merusak ekosistem jangka panjang dan memicu degradasi lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan proyek reklamasi tidak cukup hanya diukur dari hasil fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terdampak dilibatkan secara aktif dalam proses pelestarian kawasan pesisir.

Reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar membawa dampak yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Makassar tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mengelola dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan reklamasi. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan guna meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti nelayan tradisional, pelaku UMKM, dan warga pesisir yang bergantung pada wilayah laut sebagai sumber utama penghidupan. Pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga mengarah pada perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan forum dialog publik sebagai wadah partisipatif yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi dua arah, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dampak reklamasi. Dalam beberapa forum, muncul aspirasi agar masyarakat diberikan ruang usaha permanen dan tidak hanya menjadi penonton dalam proses transformasi wilayah pesisir. Meski forum dialog ini belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang merata karena keterbatasan akses dan keterwakilan kelompok masyarakat tertentu, namun langkah ini menandai komitmen awal pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih demokratis. Partisipasi masyarakat dalam forum ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan reklamasi, sekaligus mengurangi resistensi sosial yang sebelumnya muncul akibat pendekatan pembangunan yang terlalu sentralistik.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah pengembangan infrastruktur dan penyediaan ruang publik yang inklusif di kawasan hasil reklamasi. Pembangunan masjid 99 kubah, jalur pedestrian, taman, serta fasilitas sosial lainnya tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga berfungsi sebagai ruang integrasi sosial bagi masyarakat. Keberadaan ruang publik ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan manusia dan penguatan nilai-nilai budaya serta spiritual masyarakat pesisir. Dengan menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh semua kalangan, pemerintah berusaha menghindari terjadinya eksklusivitas kawasan reklamasi yang hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu, serta mendorong terciptanya lingkungan yang ramah sosial dan berkeadilan.

Di bidang ekonomi, pemerintah menginisiasi program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi untuk menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat yang terdampak langsung oleh reklamasi. Program ini mencakup pelatihan keterampilan usaha, penyediaan ruang usaha permanen di zona wisata, fasilitasi promosi produk lokal, hingga penerapan

regulasi yang mewajibkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek reklamasi. Pemerintah juga mendorong pihak pengembang untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pengembangan fisik wilayah, tetapi juga sebagai proses transformasi ekonomi yang inklusif dan berpihak pada kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan. Hamdi (2014) menegaskan bahwa kebijakan publik harus mencerminkan partisipasi, keberpihakan, dan keadilan sosial, terutama dalam proyek-proyek pembangunan yang menyentuh kelompok rentan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan upaya nyata dalam mengelola dampak reklamasi Pantai Losari melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan komunikasi partisipatif, pembangunan ruang publik inklusif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Meski berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan semua permasalahan yang muncul, namun arah kebijakan yang diambil menunjukkan orientasi pada pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Keberhasilan jangka panjang dari proyek reklamasi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa reklamasi tidak hanya menghasilkan perubahan fisik wilayah, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar membawa dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sama halnya dengan temuan Japar (2020), penelitian ini menemukan bahwa masyarakat pesisir mengalami keresahan akibat reklamasi, terutama karena kehilangan akses terhadap laut dan dampak ekologis yang belum tertangani dengan baik. Ketidakpuasan terhadap proyek reklamasi juga muncul akibat minimnya keterlibatan masyarakat, sebagaimana ditemukan pula dalam studi tersebut.

Namun, berbeda dengan penelitian Adjam & Sinyo (2023) di Kota Ternate yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa penghasilan mereka meningkat pasca reklamasi, temuan di Makassar justru menunjukkan penurunan pendapatan pada nelayan tradisional. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pendekatan kebijakan dan karakter wilayah, di mana reklamasi di Ternate lebih menyentuh kepentingan ekonomi lokal, sementara di Makassar berfokus pada sektor investasi dan pariwisata berskala besar.

Dalam aspek ekonomi, temuan ini memperkuat hasil penelitian Juardi & Bimontoro (2023) yang menyatakan bahwa reklamasi membuka peluang investasi namun tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini menambahkan bahwa walaupun ada pelatihan dan program pemberdayaan, akses terhadap manfaat ekonomi belum merata. Masyarakat dengan keterbatasan modal dan keterampilan menghadapi kesulitan beradaptasi, sehingga menciptakan kesenjangan baru di tengah pertumbuhan ekonomi.

Dari aspek lingkungan, temuan ini sejalan dengan hasil studi Nindita (2021) yang menyoroti dampak pencemaran dan perubahan ekosistem laut akibat reklamasi. Dalam penelitian ini, meskipun Pemerintah Kota Makassar mengklaim telah melakukan upaya mitigasi seperti pembangunan kanal dan ruang terbuka hijau, observasi di lapangan masih menunjukkan adanya kekeruhan air dan sampah di kawasan reklamasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya efektif dan perlu diperkuat secara teknis maupun partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan kembali hasil-hasil studi sebelumnya, tetapi juga memberikan tambahan perspektif mengenai peran pemerintah yang belum banyak disoroti dalam kajian terdahulu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya reklamasi berbasis pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, serta memastikan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. Nurdin & Hartati (2018) menyebutkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pembangunan sosial harus berbasis pada konteks lokal dan memperkuat daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah minimnya partisipasi masyarakat sebagai faktor penghambat utama dalam pelaksanaan reklamasi Pantai Losari. Meskipun pemerintah telah menyelenggarakan forum konsultasi publik, proses tersebut bersifat formalitas dan tidak mencerminkan keterlibatan nyata warga pesisir dalam pengambilan keputusan. Ketidakterbukaan informasi dan tidak meratanya akses terhadap proses perencanaan menyebabkan munculnya resistensi sosial, seperti demonstrasi dan penolakan warga yang merasa tidak dilibatkan sejak awal. Kurangnya ruang partisipatif ini menjadi penghalang utama dalam membangun legitimasi sosial terhadap proyek reklamasi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan ruang publik inklusif dan fasilitas sosial menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan persepsi positif terhadap proyek reklamasi. Pembangunan taman, jalur pedestrian, dan masjid ikonik seperti 99 kubah, memberikan ruang interaksi sosial baru yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup di wilayah pesisir, tetapi juga menciptakan ruang simbolik yang memperkuat identitas kota. Keberadaan fasilitas ini berkontribusi terhadap tumbuhnya penerimaan masyarakat terhadap proyek, khususnya di kalangan warga yang tidak bergantung langsung pada laut sebagai sumber penghidupan.

Temuan lain yang juga menarik adalah ketimpangan adaptasi ekonomi antar kelompok masyarakat. Masyarakat dengan akses terhadap modal dan informasi cenderung lebih mudah beralih ke sektor jasa dan perdagangan yang tumbuh di kawasan reklamasi. Sebaliknya, nelayan tradisional dan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan untuk beradaptasi karena keterbatasan sumber daya dan keahlian. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan disparitas pendapatan, tetapi juga memperbesar jurang sosial antara kelompok masyarakat yang mampu berintegrasi dengan dinamika reklamasi dan mereka yang terdampak secara langsung namun tidak memperoleh manfaat yang sepadan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar membawa dampak yang signifikan terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari sisi sosial, keterlibatan masyarakat dalam proses reklamasi masih tergolong minim dan bersifat formalitas, yang menyebabkan munculnya resistensi sosial serta ketimpangan partisipasi dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat juga belum merata, terutama bagi kelompok nelayan dan warga pesisir yang kehilangan akses terhadap laut. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap reklamasi terbelah antara yang melihatnya sebagai peluang kemajuan dan yang merasa dirugikan.

Dari aspek ekonomi, reklamasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan berkembangnya sektor jasa serta UMKM. Namun demikian, distribusi manfaat belum merata. Kelompok dengan akses terhadap informasi dan modal lebih cepat beradaptasi, sedangkan pelaku ekonomi kecil dan nelayan tradisional menghadapi tantangan besar akibat terganggunya sumber mata pencaharian mereka. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan

pembangunan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat terdampak secara langsung. Di sisi lain, dampak lingkungan juga cukup nyata, ditandai dengan meningkatnya kekeruhan air laut dan perubahan ekosistem pesisir. Meskipun upaya mitigasi telah dilakukan melalui pembangunan saluran kanal, ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan sampah terpadu, keberlanjutan lingkungan masih menjadi tantangan jangka panjang yang memerlukan perhatian serius.

Pemerintah Kota Makassar telah merespons berbagai dampak tersebut melalui sejumlah kebijakan, antara lain pelaksanaan sosialisasi dan forum dialog publik, pembangunan ruang publik inklusif, serta pemberdayaan UMKM di kawasan reklamasi. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengelola dampak reklamasi secara komprehensif, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dalam hal efektivitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, proyek reklamasi harus terus dievaluasi secara berkala dan dijalankan dengan prinsip partisipasi, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan pesisir yang inklusif dan berkeadilan. Simangunsong (2019) menjelaskan bahwa evaluasi berkelanjutan dalam proyek pemerintah daerah adalah kunci untuk mengidentifikasi hambatan dan menyesuaikan kebijakan secara kontekstual.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan informan yang masih terbatas pada lingkup pejabat dinas terkait dan beberapa perwakilan masyarakat pesisir, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat yang terdampak reklamasi, khususnya kelompok rentan yang sulit dijangkau seperti nelayan kecil di wilayah terluar. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengamatan lapangan hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif singkat, sehingga dinamika dampak jangka panjang dari reklamasi belum sepenuhnya tergambarkan secara utuh. Kendala lain juga ditemui pada akses terhadap dokumen perencanaan dan laporan evaluasi proyek yang bersifat internal, sehingga analisis dalam beberapa bagian masih mengandalkan data sekunder dan narasi dari informan sebagai sumber utama.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada analisis jangka panjang dampak reklamasi, khususnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan adaptasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian lanjutan juga disarankan melibatkan kelompok rentan secara lebih luas dan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk memperkaya data. Selain itu, penting untuk mengevaluasi integrasi reklamasi dengan kebijakan zonasi wilayah pesisir guna menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan kontekstual.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, khususnya kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Perencanaan Ruang, serta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan, informasi, dan akses selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada para informan dari masyarakat pesisir yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman secara terbuka. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan reklamasi pantai yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achsanuddin, A. N., Fitrianti, A. N., Yusuf, M. (2023). Analisis Pembangunan *Center Point of Indonesia (CPI)* Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8494>
- Adjam, S., & Sinyo, Y. (2023). Kajian Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Ternate. *Edukasi*. 21(3): 616-627. <https://www.researchgate.net/publication/376524738>
- Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal Of Government and Civil Society*. 3(2). <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948>
- Chee, S. Y., Othman, A. G., Sim, Y. K., Mat Adam, A. N., & Firth, L. B. (2017). Land reclamation and artificial islands: Walking the tightrope between development and conservation. *Global Ecology and Conservation*, 12, e00547. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2017.08.005>
- Djamil, M. H. A. G., Gumilang, M. R., Hantono, D. (2022). Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 18(3). <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i3.35139>
- Duan, H., Zhang, H., Huang, Q., Zhang, Y., Hu, M., Niu, Y., & Zhu, J. (2016). Characterization and environmental impact analysis of sea land reclamation activities in China. *Ocean & Coastal Management*, 130, 128-137. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.06.006>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Garis Khatulistiwa.
- Husin, S. (2017). Reclamation in the View of The Protection of Marine Environment Under the Environmental Law and The Law Concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. *Indonesian Journal of International Law*. 14(3). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/indjil14&div=23&id=&page=>
- Japar, J. M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Jurisprudentie*. 7(2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17912>
- Juardi., & Bimontoro. A. (2023). Analisis Interaksi Ekonomi Nelayan aan Pembangunan *Center Point of Indonesia* di Makassar. *Economics And Digital Business Review*. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.322>
- Nindita, R. D. (2021). *Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara*. (Skripsi UIN Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57582>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Phan, M. H., & Stive, M. J. F. (2022). Managing mangroves and coastal land cover in the Mekong Delta. *Ocean & Coastal Management*, 221, 106013. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.106013>
- Rafsanjani, D. (2021). *Reklamasi Pantai Seruni & Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Pusaka Almaida.
- Rizqiah, L. (2023). Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perikanan dan Keragaman Sumber Daya Laut. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*. 2(4). <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i04.890>

- Sengupta, D., Choi, Y. R., Tian, B., & Brown, S. (2023). Mapping 21st century global coastal land reclamation. *Earth's Future*, *11*(7), e2022EF002927. <https://doi.org/10.1029/2022EF002927>
- Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2016). Urban land teleconnections and sustainability. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *109*(20), 7687–7692. <https://doi.org/10.1073/pnas.1117622109>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

